

**14. URUSAN STATISTIK**

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Statistik pada tahun 2017 meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Pemerintahan Setda.

**a. Program dan Kegiatan**

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasi dana sebesar **Rp 348.427.183,-** atau **0,017 %** dari total alokasi APBD Tahun 2017 yang berjumlah Rp 2.000.613.704.761,-. Alokasi untuk urusan Statistik dapat terealisasi sebesar **Rp 309.169.696,-** atau 88,73%. Adapun program dan alokasi anggaran Urusan Statistik dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.C.14.1**  
**Alokasi Program Anggaran Urusan Statistik Tahun 2017**

| No.      | Program                                       | Alokasi<br>(Rupiah) | Realisasi<br>(Rupiah) |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>Belanja Langsung</b>                       |                     |                       |
| 1        | Program Pengembangan Data/Informasi Statistik | 348.427.183         | 309.169.696           |
| <b>B</b> | <b>Belanja Tidak langsung</b>                 | -                   | -                     |
|          | <b>Jumlah total</b>                           | <b>348.427.183</b>  | <b>309.169.696</b>    |

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

**b. Alokasi Program dan Kegiatan****1). Program Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah**

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang didukung dan berbasis pada data. Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh maka hasil perencanaan akan semakin baik. Idealnya sebuah perencanaan pembangunan juga demikian adanya. Data adalah nomor satu. Dengan adanya data yang akurat maka peningkatan kesejahteraan dan martabat manusia akan lebih mudah dicapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan Penyusunan Statistik Daerah. Publikasi Statistik Daerah disusun untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Wonosobo secara umum. Dalam publikasi ini dapat diperoleh gambaran pencapaian status sosial ekonomi masyarakat Wonosobo melalui berbagai indikator kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama dan sosial lain, serta perumahan dan lingkungan hidup. Selain itu juga dapat diperoleh berbagai indikator lain seperti IPM, (Indeks Pembangunan Manusia), Kemiskinan,

### III.C.14. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik

Inflasi, Akomodasi, Keuangan Daerah, Transportasi, PDRB, (Pendapatan Daerah Regional Bruto), Pemerataan Pendapatan dan Pembangunan Gender. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), kompilasi data dari instansi terkait, serta perhitungan dari berbagai survey tahun 2016.

#### c. Capaian Kinerja Urusan Statistik

**Tabel III.C.14.2**

**Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017**

**Berdasarkan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

| No | Indikator                    | Capaian kinerja |      |      |
|----|------------------------------|-----------------|------|------|
|    |                              | 2015            | 2016 | 2017 |
| 1. | Buku "Kabupaten dalam angka" | ada             | ada  | Ada  |
| 2. | Buku "PDRB Kabupaten"        | ada             | ada  | Ada  |

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa selama tiga tahun berturut-turut pemenuhan terhadap indikator ketersediaan buku "Kabupaten Dalam Angka" dan buku "PDRB Kabupaten" selalu ada/tersedia. Kedua produk statistik tersebut merupakan statistik dasar sehingga menjadi output tahunan bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten. Produk "Kabupaten Dalam Angka" dan buku "PDRB Kabupaten" dapat diakses pada website BPS Wonosobo (<https://wonosobokab.bps.go.id/>) dan Bappeda Wonosobo (<https://allnewbappeda.wonosobokab.go.id/>).

**Tabel III.C.14.3**

**Capaian Kinerja Urusan Statistik**

**Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017**

| No | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                           | Realisasi Capaian 2016 | Target 2017 | Realisasi Capaian 2017 | % Realisasi Capaian 2017 | Status Capaian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 1  | Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS     | 1                      | 5           | 1                      | 20,00                    | ↓              |
| 2  | Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS | 10%                    | 20%         | 100,00%                | 500,00                   | ○              |
| 3  | Persentase Publikasi data/kajian wajib yang diupdate                                          | 24%                    | 75%         | 100,00%                | 133,33                   | ○              |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wonosobo, 2018

**Keterangan Status Capaian:**

|   |                                       |                                      |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ○ | :Tercapai                             | Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$ |
| → | :Tidak tercapai                       | Realisasi capaian 90%- 99%           |
| ↓ | :Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian $\leq 90\%$        |

Kabupaten Wonosobo tahun 2017 hanya mengeluarkan 1 buah saja publikasi data yang diakui oleh BPS yaitu Statistik Daerah. Sementara itu, produk statistik sektoral lainnya seperti Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Profil Pendidikan, Profil Kesehatan, Pendataan Keluarga Sejahtera dan Basis Data Terpadu (BDT) belum diajukan ke proses pengakuan ke BPS Wonosobo.

**c. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan urusan Statistik, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

**Tabel III.C.14.4**  
**Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Statistik**

| No | Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ketersediaan ( <i>availability</i> ) data yang masih rendah, yang disebabkan oleh belum adanya tenaga khusus statistik, penyimpanan dan pengolahan data masih berlangsung secara manual/semi manual. Apabila data tersedia, masih bersifat inventarisasi dan sekadar input data, belum maksimal digunakan dalam pedoman perencanaan. | Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi " <b>Satu Data Untuk Pembangunan</b> " melalui <b>Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)</b> . Dimana sistem ini sesuai dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang sudah <i>diinput</i> dalam SIPD. |
| 2. | Data-data yang tersedia tidak didukung oleh data pendukung/metadatatanya..                                                                                                                                                                                                                                                           | Perlunya membangun sistem metadatatanya yang melekat ke data, dimana pengguna data dapat sekaligus akses data berikut metadatatanya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan penelusuran metodologi dibalik produksi data atau perubahan-perubahan yang terjadi atas data tertentu karena perlakuan metodologis dan perubahan yang dilakukan                                |

III.C.14. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik**

| No | Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | terdokumentasi dalam metadata data tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | Ketersediaan ( <i>availability</i> ) data itu sendiri, dan yang kedua adalah lokasi sumber data yang masih persial. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data di Indonesia juga belum dapat menyediakan seluruh kebutuhan data untuk pembangunan daerah, terutama yang terkait dengan data sektoral di kabupaten/kota. | Setiap Perangkat Daerah harus mempunyai database yang <i>up to date</i> , sehingga pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan teknis institusinya bisa diukur langsung dan diketahui target pencapaiannya. Selain itu perlu dibangun kemudahan pertukaran data antar perangkat daerah serta memberikan efisiensi pemanfaatan dana dan waktu dalam proses pelaksanaan monitoring maupun evaluasi kegiatan dan juga bermanfaat bagi publik |